

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Wow, Dana Revitalisasi Trotoar Capai Triliunan

**JAKARTA** - Komisi D (bidang pembangunan) DPRD DKI Jakarta menyoroiti anggaran revitalisasi trotoar senilai Rp1,2 triliun pada 2020. Informasi yang dihimpun, pengajuan rencana pembangunan atau revitalisasi trotoar dilakukan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Ada empat tipe penataan trotoar, namun tidak ada tipe memasukkan lapak PKL.

Tipe pertama, dengan ukuran di atas 5,5 meter, terdiri atas pembatas jalan, jalur sepeda, dan pohon. Tipe kedua memiliki ukuran 3,5-5,5 meter dengan pembatas jalan dan jalur sepeda. Tipe ketiga berukuran 2-3,5 meter dengan pembatas jalan dan trotoar. Terakhir, berukuran 1,5-2 meter dengan hanya memiliki trotoar.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan saat mengetahui hal tersebut langsung meminta kejelasan konsep. "Tapi saat pemerintah sampaikan kepada masyarakat soal PKL, ini saya khawatir. Yang saya khawatirkan adalah, akan ada mobilisasi pedagang dari luar kota. Kemudian berdagang di trotoar yang direvitalisasi. Titik mana PKL itu, kita diskusikan bersama," ujarnya dalam rapat rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Sedangkan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menganggap pengajuan anggaran serta tindakan Gu-

bernur Anies Baswedan tidak konsisten. Politisi Partai Demokrat itu juga minta kejelasan apakah ada konsep penataan PKL di revitalisasi trotoar. "Kita perlu pertimbangan apa yang disampaikan. Bahwa trotoar untuk pejalan kaki 5,5 masih memungkinkan kegiatan lain, antara lain PKL. Ini perlu kaji pernyataan bahwa, nawaitunya pejalan kaki, tapi sebagian space diberikan untuk PKL," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, rencana penataan PKL belum final. Kebijakan itu masih dikaji oleh Dinas Koperasi; Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (KUKMP); serta Pasar Jaya.

"Sebetulnya dalam Permen PU 3/2014 memang dimungkinkan secara teknis jika trotoar 5,5 meter. Apabila tidak mengganggu ruas pejalan kaki. Sebagai pelengkap kenyamanan pejalan kaki. Itu pun juga diatur juga dimensi bangunan, kemudian jam kerjanya tidak permanen. Tidak boleh menetap permanen harus mobile. Itu masih dalam kajian," beber Hari.

Ia berharap, kajian ini bisa berubah menjadi dasar hukum sehingga ada penataan PKL di beberapa titik yang ditentukan. "Mudah-mudahan kajian ini dengan diterapkan dengan peraturan gubernur. Kemudian, PKL yang okupasi di 1,5 sampai 2 meter tidak ada lagi, nantinya dibolehkan di 5,5 meter," ucap Hari. (aen)